

# KEBIJAKAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

## INDONESIAN SEA DEFENSE STRATEGY POLICY IN AN ECONOMIC PERSPECTIVE

Mayang Agnezia Parasasti, Lukman Yudho Prakoso, Aries Sudiarso

PRODI STRATEGI PERTAHANAN LAUT FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(mayangagnez11@gmail.com, lukman.prakoso@outlook.com, aries.25st@yahoo.co.id)

**Abstrak-**Luas perairan Indonesia yang mencapai 6.400.000 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai sebesar 108.000 km<sup>2</sup>, serta posisi silang yang strategis, menyebabkan Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di Kawasan. Luasnya perairan yang dimiliki Indonesia berimplikasi terhadap belum dapat tercapainya keamanan laut yang maksimal oleh pemerintah. Padahal jika dilihat dari perspektif ekonomi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari sumber daya lautnya. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi Kebijakan Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Ekonomi. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai strategi kelautan Indonesia, yang mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan ini kemudian direfleksikan dalam beberapa konsep yaitu: Ekonomi Biru, Kesadaran Domain Maritim, Poros Maritim Dunia, Wawasan Nusantara.

**Kata Kunci:** Ekonomi Biru, Kebijakan Pertahanan Laut, Kesadaran Domain Maritim, Poros Maritim Dunia, Wawasan Nusantara.

**Abstract-**The area of Indonesian waters reaches 6,400,000 km<sup>2</sup>, with a coastline of 108,000 km<sup>2</sup>, as well as a strategic cross position, causing Indonesia to have a fundamental interest in controlling and utilizing the sea, having a strong maritime identity and culture, and taking advantage of a strategic position for the benefit of the nation. and create security in the Region. The extent of the waters owned by Indonesia has implications for the government not being able to achieve maximum marine security. When viewed from an economic perspective, Indonesia has enormous potential from its marine resources. This article aims to elaborate on the Indonesian Marine Defense Strategy Policy from an Economic Perspective. The writing method in this article uses descriptive qualitative with literature study. The results of the study indicate that the Indonesian government has a policy regarding Indonesia's marine strategy, which refers to the Indonesian Development Vision as stated in Law Number 17 of 2007 concerning the National Long-Term Development Plan 2005-2025 and Law Number 32 of 2014 concerning Marine Affairs. This policy was then reflected in several concepts, namely: Blue Economy, Maritime Domain Awareness, World Maritime Axis, Archipelago Insights.

**Keywords:** Archipelago Insight, Blue Economy, Maritime Domain Awareness, Sea Defense Policy, World Maritime Axis.

### Pendahuluan

Laut merupakan suatu bagian integral dari wilayah Indonesia yang tidak

dapat dibagi-bagi. Indonesia memiliki luas perairan yang mencapai 6.400.000 km<sup>2</sup>,

dan panjang garis pantai sebesar 108.000 km<sup>2</sup>. Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di Kawasan (Supartono, 2014).

Secara strategis, posisi Indonesia tidak hanya dapat terlihat dari posisi persilangan antar dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (samudera pasifik dan samudera hindia) saja, tetapi juga antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, antara komunis di utara dan individualisme liberal di selatan, antara penghasil energi yang ada di selatan, dengan pengguna energi di utara, antara global power di utara dengan middle power di selatan, antara *nuclear power* di utara dengan *non-nuclear power* di selatan, serta antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan non-anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Secara politis, Indonesia berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang saat

ini mulai bangkit kembali. Posisi strategis Indonesia, yang juga didukung oleh faktor geografis serta kondisi sosial ekonominya menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, dan berimplikasi terhadap pengaruh Indonesia untuk menciptakan kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017). Bagi Indonesia lautan merupakan media yang merefleksikan eksistensi dari adanya bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa tanpa laut yang ada di bawah kedaulatan NKRI dan yurisdiksi nasional Indonesia, negara kepulauan Indonesia tidak akan pernah ada. Bentuk negara kepulauan Indonesia tercipta karena adanya wilayah laut. Sehingga, bagi NKRI wilayah laut memiliki fungsi yang sangat vital.

Luasnya perairan yang dimiliki Indonesia berimplikasi terhadap belum dapat tercapainya keamanan laut yang maksimal oleh pemerintah. Padahal jika dilihat dari perspektif ekonomi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari sumber daya lautnya. Indonesia memiliki sekitar 35 ribu spesies biota laut, terdiri atas 910 spesies karang (75 persen total karang dunia), 850 spesies sponge, 13 dari 20 spesies lamun dunia, dan 682 spesies

rumput laut, serta 2.500 spesies molusca, 1.502 spesies krustasea, 745 spesies ekinodermata, 6 spesies penyu, 29 spesies paus dan lumba-lumba, 1 spesies dugong dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Dalam bidang ekonomi, Indonesia akan memegang peranan penting dalam perdagangan dunia, karena 40 persen perdagangan internasional melalui perairan Indonesia (Supriyono, 2019). Kondisi ini menarik keinginan banyak negara yang berkepentingan untuk mencoba mengelolanya secara legal maupun ilegal yang dalam pemanfaatannya dapat merugikan dan membahayakan lingkungan maritim Indonesia (Dahuri, 2018). Potensi kekayaan ekonomi kelautan Indonesia, serta besarnya harapan Indonesia agar dapat menjadi poros maritim dunia belum diikuti dengan upaya strategis dan langkah sinergis, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Potensi perikanan tangkap yang diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,007 juta ton atau 80% dari MSY (*Maximum Sustainable Yield*), hingga saat ini kemampuan jumlah tangkapannya baru sebatas lebih kurang mencapai 3,5 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun. Padahal

jika seluruh potensi perikanan tangkap tersebut dimanfaatkan, diperkirakan diperoleh nilai ekonomi sebesar US\$15,1 miliar (DEKIN, 2019).

Perumusan Kebijakan Strategi Pertahanan Laut dalam Perspektif Ekonomi, merupakan konsep yang sangat penting untuk diimplementasikan mengingat bahwa Indonesia memiliki luas dan potensi lautan yang sangat besar, sehingga keamanan wilayah sebagai suatu integral yang tak dapat dipisahkan memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kedaulatan ekonomi dengan memaksimalkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia. *Concern* terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia adalah suatu keharusan yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Realisasi dan aktualisasi visi Indonesia untuk dapat menjadi Poros Maritim Dunia juga harus memiliki dasar kebijakan yang jelas dan terarah.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-naratif. Peneliti memberikan gambaran dan narasi dari topik yang dikaji melalui data dan fakta-fakta yang ada mengenai kebijakan strategi pertahanan laut Indonesia dalam perspektif ekonomi.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh dari hasil kajian pustaka dan interpretasi peneliti dari bahan yang terdapat dalam jurnal artikel serta sumber literatur review lainnya seperti buku dan sumber internet. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data-data yang didapat lalu dilakukan analisa isinya untuk mendukung permasalahan yang sedang diteliti, data-data yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari internet berupa jurnal artikel, *e-book*, serta data-data kementerian terkait lainnya (Sugiyono, 2019). Kajian penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori strategi *means, ways dan ends* oleh Lykke, yang direfleksikan dalam teori strategi, dalam artikel ini peneliti juga menggunakan *Sea Power Theory*. Kedua teori ini nantinya akan membantu peneliti dalam menganalisis dan melihat kebijakan strategi pertahanan laut yang diimplementasikan oleh Indonesia dalam perspektif ekonomi.

### **Hasil dan Pembahasan Strategi**

Secara etimologi, strategi berasal dari Bahasa Yunani "*strategeia*" yaitu (*stratos* = militer, dan *ag*= memimpin), yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang Jenderal. Konsep ini sangat relevan pada masa itu, karena kondisi yang sering diwarnai dengan perang, sehingga Jenderal sangat dibutuhkan untuk memimpin suatu pasukan agar dapat memenangkan peperangan. Sedangkan, menurut KBBI strategi merupakan: (1) Ilmu dan seni semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melakukan kebijaksanaan tertentu perang dan damai; (2) Ilmu dan seni memimpin bala tentara menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan; (3) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) Tempat yang baik menurut siasat perang.

Sehingga dari beberapa definisi tersebut, strategi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*), serta menentukan sarana dan prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Esensi dari strategi ialah sebagai proses untuk mengambil keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, *goals, objective*,

target), *Ways* (cara bertindak, *course of action, concept, methode*), dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). “*Strategy is the bridge that relates military power to political purpose. it is neither military power per se nor political purpose. by strategy mean the use that is made of force and the threat of force for the end of policy*” (Clausewitz, 1984).

### **Sea Power**

Terminologi “*sea power*” pertama kali digunakan oleh Laksamana Muda Alfred Thayer Mahan (1840-1914), seorang Angkatan Laut USA, dalam bukunya *The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783*. Dalam bukunya tersebut, Mahan menjelaskan bahwa terdapat enam elemen pokok yang akan menjadi modal utama dalam membangun sebuah negara yang memiliki kekuatan laut yang besar, yaitu: letak geografi (*geographical position*); bangun muka bumi (*physical conformation*), luas dan panjang wilayah (*extent of territory*), karakter penduduk (*character of the people*), jumlah penduduk (*number of population*) dan karakter pemerintah (*character of government*). Keenam elemen ini bersifat universal dan tanpa

batas waktu (*universal and timeless in character*) (Mahan, 2011).

Posisi geografis disebut sebagai kondisi yang paling signifikan. Sebagai contoh, saat terjadinya kebangkitan kekuatan laut Inggris (*British Sea Power*) di masanya. Inggris memiliki posisi yang ideal yaitu terletak di persimpangan jalur perdagangan Eropa. Karenanya, Inggris dapat mempotensikan serta mengamankan jalur perdagangannya dari penggunaan laut (*sea control*) oleh pihak lawan. Secara posisi geografis, Inggris memiliki proteksi alami dari invasi musuh sehingga Inggris tidak harus memiliki kekuatan Angkatan Darat yang besar.

Angkatan Laut yang kuat serta hubungan perdagangan yang menguntungkan dengan negara lain, merupakan dua aspek penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara untuk mencapai *sea power* yang diharapkan. Visi maritim yang kuat juga harus dimiliki oleh setiap warga negara agar dapat mendukung pemahaman bahwa laut merupakan sumber kekuatan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, peran pemerintah juga memainkan pengaruh yang sangat penting agar negara lain tidak melakukan dominasi atas wilayah lautnya. Menurut Mahan, pencapaian *national power* dapat terefleksi melalui

*national strategy* dibandingkan dengan *military strategy* (Marsetio, 2014).

Secara sederhana dapat dipahami bahwa, *Sea power* dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut yang memadai seta proporsional. *Sea power* juga dapat bermakna sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara dalam menggunakan dan mengendalikan laut (*sea control*), serta mencegah lawan untuk menggunakannya (*sea denial*), sehingga keadaan laut dengan segala aspeknya mampu dijadikan sebagai kekuatan politik serta ekonomi bagi bangsa Indonesia. *Sea power* digambarkan seperti dua sisi mata koin yang artinya, sebagai *input* terdiri dari berbagai elemen kekuatan nasional di laut seperti penegakan hukum, industri pertahanan maritim, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Selain itu sebagai *output*, merupakan sebuah konsekuensi kemampuan untuk mengelola laut, kemampuan untuk mempengaruhi perilaku *state or non-state actor*, baik di dan lewat laut (Marsetio, 2014).

### **Kebijakan Ekonomi dalam Strategi Pertahanan Laut**

Tujuan dari kebijakan ekonomi kelautan adalah untuk menjadikan lautan

sebagai basis dari pembangunan ekonomi nasional. Potensi dari ekonomi kelautan Indonesia tidak hanya berada di wilayah perairan nasional, tetapi juga mencakup wilayah perairan yurisdiksi serta perairan Internasional yang dapat dikelola sesuai dengan hukum internasional. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya kelautan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan (Alhusain, Mauleny, dkk., 2019). Beberapa program utama dalam implementasi strategi kebijakan ekonomi kelautan ini yaitu: (1) Menyusun dan mengembangkan basis data serta informasi mengenai ekonomi kelautan, (2) Menciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien, (3) Mengembangkan usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional; (4) Membangun kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru (*blue economy*) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar,

serta perairan laut di wilayah Indonesia secara realistis; (5) Mengoptimalkan penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan pelaku usaha di bidang kelautan, terutama bagi para nelayan; (6) Melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, serta memperkuat mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi hingga pada proses pemasaran; (7) Melakukan pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang akan saling memberikan keuntungan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar; serta (8) Melakukan pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis dalam bidang kelautan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017).

Selain itu, berdasarkan aspek politik, posisi geopolitik dan geostrategis, posisi Indonesia sebagai negara terbesar yang ada di Kawasan Asia Tenggara, dengan empat *choke points* dari sembilan *choke points* strategis yang ada secara global, serta tiga ALKI yang mengintegrasikan kawasan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan Asia Timur dengan Australia. Menyebabkan Indonesia memiliki peran strategis dalam menentukan stabilitas keamanan di

Kawasan (Hermawan, Prakoso, & Sianturi, 2020).

### **Implementasi Visi dan Kebijakan Kelautan Indonesia**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam kebijakan. Aplikabel atau tidaknya sebuah kebijakan sangat ditentukan melalui implementasi kebijakan, tahapan ini juga penting untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* merupakan hasil yang diharapkan dari sebuah kebijakan, dan biasanya dapat terlihat dalam waktu yang cenderung singkat yaitu pada implementasi kebijakan. Sementara, *outcomes* merupakan dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau cenderung dalam waktu yang lebih lama pasca implementasi kebijakan (Indiahono, 2009).

Dalam sektor keamanan, posisi strategis Indonesia berimplikasi terhadap berkembangnya berbagai isu keamanan maritim. Beberapa diantaranya yaitu, Perselisihan mengenai batas maritim serta berbagai tindak kejahatan yang banyak terjadi di laut, dan juga berbagai kegiatan ilegal yang melanggar hukum seperti *human trafficking*, penyelundupan

dan perompakan kapal, pembajakan, *illegal fishing*, *illegal toging*, eksploitasi sumber daya alam ilegal, penyelundupan narkoba, serta berbagai ancaman kerusakan ekosistem laut. Keseluruhan masalah tersebut berpengaruh terhadap terhambatnya pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia (Supriyono, 2019).

Sesuai dengan Pidato Presiden Joko Widodo, visi Kelautan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini berarti bahwa, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia diharapkan dapat mencapai kemajuan, kemandirian, kedaulatan dan kekuatan di sektor maritim, sehingga *output* yang diinginkan adalah untuk tercapainya kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017).

Sebagai sebuah negara kepulauan, visi dan kebijakan Pemerintah RI saat ini telah membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia berdasarkan aspek geo-strategi serta geo-ekonomi. Arah kebijakan pemerintah saat ini sangat fokus terhadap sektor maritim. Visi yang dikenal sebagai “Poros Maritim Dunia” (PMD) menjadi kerangka utama pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai gugusan pulau, yang dikelilingi oleh samudera dan, laut, selat dan teluk, bangsa Indonesia tidak dapat memungkiri ruang hidupnya. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa”. Berdasarkan doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar utama PMD dibentuk dari aspek penting yang akan menjadi nafas pembangunan negara maritim, yakni budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas, diplomasi maritim dan pertahanan maritim.

### **Strategi Pertahanan Laut Indonesia Wawasan Nusantara dalam Konsep Poros Maritim Dunia**

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017). Visi PMD merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan langkah cermat dan tepat untuk mendukung program pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai PMD dalam perspektif pertahanan. Secara konseptual, PMD merupakan sebuah penegasan kembali mengenai pentingnya geo-politik dan geo-ekonomi bangsa Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia dengan bentuk geografis negara kepulauan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran penting dalam percaturan politik dan perdagangan dunia. Konsep PMD merupakan sebuah aktualisasi dari konsep Wawasan Nusantara yang selama ini hanya terkandung dalam bingkai retorika (Kuncoro, 2015).

Terdapat dua makna yang terkandung dalam Wawasan Nusantara, yaitu: (a) Sebagai bentuk integratif wilayah Indonesia yang tak dapat

dipisahkan antara darat, laut dan udara di atasnya; dan (b) Sebagai posisi strategis Archipelago sebagai jembatan dunia atau poros dunia. Kedua hal ini menjadi modal yang direfleksikan ke dalam suatu manajemen terpadu dan terarah untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD (Widyoutomo, 2020).

Untuk menciptakan kondisi ketahanan nasional yang ideal harus terbentuk oleh kesatuan cara pandang dari delapan aspek kehidupan nasional (*astagatra*) yang terdiri dari *Pancagatra* atau *Gatra Sosial* (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) dan *Trigatra* atau *Gatra Alamiah* (geografi, demografi dan sumber daya alam). Antara kedua *gatra* harus terbentuk suatu jalinan yang dapat disimpulkan sebagai tatanan geo-politik dan geo-ekonomi bangsa. Hal ini merupakan artikulasi yang sangat komprehensif dalam konsep negara maritim. Menurut Alfred Thayer Mahan, terdapat enam elemen penting dari kekuatan laut/maritim (*Sea Power*), yaitu *geographical position* (posisi geografis), *physical conformation* (bentuk fisik), *extent of territory* (luas wilayah), *number of population* (jumlah penduduk), *national character* (karakter bangsa) dan *character of government* (karakter pemerintah) (Mahan, 2011).

Sehingga, *sea power* tidak hanya terbatas pada kekuatan angkatan laut (*naval power*) saja, tetapi juga mencakup seluruh komponen kekuatan maritim nasional, yang memiliki arti lebih luas terkait dengan kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian internasional melalui laut, penggunaan dan kontrol terhadap sumber daya laut, penggunaan kekuatan angkatan laut dan perekonomian maritim sebagai instrumen diplomasi, penangkalan dan pengaruh politik pada masa damai serta pengoperasian angkatan perang atau TNI pada masa perang. Sehingga, bagi Indonesia *sea power* merupakan hal yang sangat penting, karena keseluruhan elemen dalam *sea power* akan menjadi modal dalam pembangunan dan pendayagunaan kekuatan maritim nasional (Supartono, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep Wawasan Nusantara, Poros Maritim Dunia dan *Sea Power* memiliki korelasi yang pada dasarnya mengarah pada satu tujuan yakni untuk mencapai integritas dan kapabilitas negara maritim. Pencapaian tersebut membutuhkan berbagai komponen pertahanan di dalamnya, bukan hanya kekuatan angkatan laut saja.

### **Maritime Domain Awareness (MDA) Sebagai Aktualisasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan di Indonesia**

Sebagai negara dengan perairan teritorial, zona tambahan dan ZEE yang sangat luas, maka merupakan suatu keharusan bagi Indonesia untuk membangun MDA. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia harus menetapkan sejumlah perairannya sebagai alur lintas kepulauan. Saat ini terdapat tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) utara-selatan. Beberapa negara yang memiliki kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik seperti Amerika Serikat dan Australia masih terus mendesak Indonesia untuk menetapkan ALKI timur-barat (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017).

Menurut Indonesia, ketiga ALKI yang telah ada serta hak lintas damai seperti yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 telah mewadahi kepentingan pelayaran internasional. Eksistensi MDA memiliki esensi yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu untuk mengawasi wilayah perairannya, termasuk di ALKI. Kegiatan perdagangan serta transportasi internasional melalui jalur komunikasi laut/SLOC (*Sea Lanes of Communication*), dan jalur perdagangan laut/SLOT (*Sea Lanes of Trade*) di Kawasan perairan Asia

Tenggara merupakan fakta yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta sifatnya akan terus meningkat dengan dinamika yang sangat cepat. Peningkatan dan perluasan tersebut tidak lepas dari peran kawasan Asia Pasifik (di mana Asia Tenggara berada), sebagai mesin pertumbuhan (*powerhouse*) ekonomi dunia di abad ke-21 menggantikan kawasan Atlantik yang saat ini terus mengalami resesi ekonomi berkepanjangan (Hutagalung, 2017).

Hal ini kemudian berimplikasi terhadap pentingnya untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan sebagai salah satu prasyarat utama. Lewat MDA, diharapkan semua kegiatan yang terjadi di perairan Indonesia dapat dipantau dan diketahui secara real time, sehingga aksi-aksi penindakan terhadap dugaan pelanggaran dapat dilaksanakan dengan cepat (Marsetio, 2014).

Konsep dari kesadaran domain maritim ini didefinisikan sebagai keseluruhan area serta segala sesuatu yang berada di dalam, di atas, di bawah, serta yang berkaitan, berhubungan atau berbatasan dengan laut, samudera atau jalur navigasi lainnya, termasuk segala aktivitas yang berkaitan dengan kemaritiman, infrastruktur, orang/pelaku, muatan dan kapal serta kendaraan

pengangkut lainnya. *Maritime Domain Awareness* (MDA) diartikan sebagai pemahaman secara efektif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan domain maritim, yang dapat memberikan dampak terhadap keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan, serta mampu mengidentifikasi ancaman secara dini dan pada jarak sejauh mungkin dari pantai (COLP, 2005).

Dinamika progresifitas serta regresifitas dalam sebuah negara kepulauan sangat tergantung pada kemampuannya mengelola serta memanfaatkan wilayah perairan atau lautannya. Sebagai negara kepulauan terbesar, sudah seharusnya Indonesia memiliki atau menerapkan MDA demi kemajuan serta kemakmuran bangsa. Karakter dan jiwa bahari, serta wawasan kemaritiman sangat dibutuhkan dalam mengelola atau memanfaatkan laut. Kesadaran bersama untuk memposisikan lautan sebagai sumber kehidupan seperti daratan juga menjadi urgensi bagi Indonesia. Faktor krusial lainnya bagi terbentuknya MDA adalah untuk membentuk rasa aman dalam menjalankan aktivitas kemaritiman. MDA tercipta sebagai implikasi dari pentingnya sistem pertahanan yang didukung oleh

sistem pemantauan dan pengamanan yang baik dan aktivitas maritim masyarakat yang berani melakukan terobosan-terobosan keluar dari kebiasaan tradisional di bidang maritim (Anugerah, 2017).

Terbentuknya *benign environment* bagi aktivitas maritim harus didukung oleh kebijakan nasional bidang maritim yang kemudian diturunkan dalam bentuk strategi maritim. Sehingga, *grand maritime policy*, menjadi suatu konsep penting untuk merefleksikan kepentingan nasional Indonesia di dan lewat laut, serta bagaimana menata penggunaan laut secara lestari dan seksama. *Grand maritime policy* Indonesia dapat menjadi jawaban rasional terhadap pengelolaan ruang hidup (*libensraum*) yang berbentuk negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk membangun visi maritim bangsa Indonesia dalam bingkai Wawasan Nusantara merupakan kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, serta mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan visi

maritim bangsa Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun perlu dipandang secara komprehensif integral yang mencakup berbagai aspek seperti: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta kondisi geografi, demografi dan sumber daya alam yang saling berkorelasi antar satu dengan lainnya.

### **Ekonomi Biru (*Blue Economy*)**

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Ekonomi biru merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan bagi Indonesia (Kemenko Kemaritiman, 2017).

Guru Besar Maritim dan Perikanan Rokhmin Dahuri pernah menyatakan, jika 500.000 lahan payau hektare digarap

untuk usaha tambak udang, dengan produktivitas rata-rata 2 ton per tahun per hektar, produksi nasional akan mencapai 1 juta ton per tahun. “Kalau nilai ekspor udang delapan dollar AS per kilogram, per tahun kita bisa mendapat devisa delapan miliar dollar AS dari udang saja” (Dahuri, 2018).

Bagi mayoritas negara yang ada di dunia, laut merupakan suatu wadah bagi kepentingan perekonomiannya, baik sebagai eksploitasi sumber daya alam maupun perlintasan perdagangan. Globalisasi yang dimulai dari laut menempatkan laut pada posisi yang sangat strategis, serta kritis dalam sistem global saat ini. Ancaman terhadap keamanan maritim akan berimplikasi langsung terhadap globalisasi yang bertumpu pada pergerakan barang dan jasa lewat laut (Marsetio, 2014).

Konsep ekonomi biru (*blue economy*), dapat dijadikan suatu alternatif dalam pembangunan kelautan dan perikanan saat ini dan ke depan. Dalam konsep ekonomi biru, aspek keberlanjutan dan inovasi merupakan hal yang sangat diutamakan. Adanya inovasi-inovasi tersebut dapat berimplikasi terhadap pembukaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi dalam skala yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat. Saat ini, pemerintah telah mulai mengimplementasikan konsep kebijakan tersebut, salah satunya yaitu dengan diterapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan di bawahnya. Indonesia juga telah aktif terlibat dalam forum ekonomi keberlanjutan di dunia internasional. Kemudian, agar konsep ini dapat lebih diserap secara luas oleh masyarakat, masyarakat harus dapat dilibatkan secara langsung sehingga keberhasilan konsep ini dapat dicapai (Alhusain, Mauleny, dkk., 2019).

### **Kesimpulan**

Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tujuan dari kebijakan ekonomi kelautan adalah untuk menjadikan lautan sebagai basis dari pembangunan ekonomi nasional. Potensi dari ekonomi kelautan Indonesia tidak hanya berada di wilayah perairan nasional, tetapi juga mencakup wilayah perairan yurisdiksi serta perairan

Internasional yang dapat dikelola sesuai dengan hukum internasional.

Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya kelautan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan. Kebijakan ini kemudian direfleksikan dalam beberapa konsep yaitu: Ekonomi Biru, Kesadaran Domain Maritim, Poros Maritim Dunia, Wawasan Nusantara.

Sebagai sebuah negara kepulauan, visi dan kebijakan Pemerintah RI saat ini telah membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia berdasarkan aspek geo-strategi serta geo-ekonomi. Arah kebijakan pemerintah saat ini sangat fokus terhadap sektor maritim. Visi yang dikenal sebagai “Poros Maritim Dunia” (PMD) menjadi kerangka utama pembangunan di segala bidang.

Bagi mayoritas negara yang ada di dunia, laut merupakan suatu wadah bagi kepentingan perekonomiannya, baik sebagai eksploitasi sumber daya alam maupun perlintasan perdagangan.

Sebagai sebuah negara maritim, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dari berbagai aspek, mengingat bahwa Indonesia memiliki luas dan potensi lautan yang sangat besar, sehingga keamanan wilayah sebagai suatu integral yang tak dapat dipisahkan memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kedaulatan ekonomi dengan memaksimalkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia. Kebijakan strategi pertahanan laut Indonesia harus difokuskan pada berbagai aspek terutama dalam perspektif keamanan dan perekonomian. Mengingat bahwa Indonesia memiliki luas lautan yang sangat besar dengan berbagai potensi ekonomi yang berasal dari sumber daya alam dan mineral yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhusain, Achmad Sani, & Mauleny, Ariesy Tri, dkk. (2019). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis?.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anugerah, P.T. (2017). *Maritime Domain Awareness Concept. Jurnal Keamanan Maritim, Vol.2. No.1.*
- Clausewitz. C. V. (1948). *On War* Terjemahan. New York: Oxford University Press.
- COLP, C. F. (2005). *US National Plan to Achieve Maritime Domain*

- Awereness. New Hampshire: Rhodes Academy.
- Dahuri, R. (2018). Menuju Inndonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Bogor: PT. Roda Bahari.
- DEKIN. (2019, September 10). *Perikanan Indonesia*. Retrieved from bumn.go.id: <https://bumn.go.id/perikananindonesia/berita/82/Dewan.Kelautan.Indonesia>.
- Hermawan, Tofan, Prakoso, Lukman Yudho, & Sianturi, Dohar. (2020). STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM ANALISA DAMPAK DAN UPAYA PEMERINTAH MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol.6, No.3, 284.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pasific Studies*, 18.
- Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2017). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017: Kebijakan Kelautan Indonesia. Retrieved from Kemenko Kemaritiman: [https://maritim.go.id/Kebijakan\\_Kelautan\\_Indonesia\\_-\\_Indo\\_vers.pdf](https://maritim.go.id/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf)
- Kuncoro, F. (2015). Membangun Kekuatan Nasional dengan Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan*, Vol.5, No.2, Agustus.
- Mahan, A.T. (2011). *The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783*. London: Years Book Ltd.
- Marsetio, D. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. (2019). Stretegi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Maritim di Wilayah Perairan RI. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol.2, No.5, 116.
- Widyoutomo, A. (2020). Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Maritim*, Vol.1, No.1, Februari.